

PROFESIONALISASI POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Akhir-akhir ini banyak orang yang melontarkan gagasan tentang kemungkinan diterapkannya pikiran tentang “profesionalisme politik” atau “politik profesional”. Lepas dari pengertian yang kurang jelas atau berbeda-beda sekitar istilah-istilah itu, namun gejala pelontarannya itu sendiri harus dipandang sebagai indikasi kepada suatu perkembangan sosial-politik kita yang positif.

Perkembangan positif itu ialah adanya keberanian yang semakin meningkat untuk menyatakan suatu keinginan di bidang politik. Pelontaran sekitar gagasan “profesionalisme politik” tentu mengimplikasikan penilaian bahwa sistem perpolitikan kita masih belum profesional, alias “amatir” atau malah barangkali “amatiran”. Oleh karena itu, di balik pelontaran ide tentang “profesionalisme politik” terselip keinginan agar mutu perpolitikan kita, melalui para aktor politiknya, hendaknya ditingkatkan. Dan adanya keinginan itu sendiri dapat dipandang sebagai gejala adanya tuntutan politik yang meningkat, yang tentunya juga berarti meningkatnya kesadaran rasa ikut memiliki dengan wujud peran serta di bidang politik. Oleh karena itu, sikap yang pertama-tama harus ditegakkan menghadapi berbagai pelontaran tuntutan itu ialah dengan memahami dan menerimanya secara positif.

Sesungguhnya, artikulasi politik tidaklah hanya menjadi tugas kaum politisi saja. Di setiap masyarakat, hanya sebagian kecil saja komunikasi politik berasal dari para politisi. Bahkan ada indikasi

yang amat kuat bahwa semakin maju masyarakat, semakin banyak tumbuh partisipan politik tanpa kekuasaan atau peran politik formal. Mereka ini dapat tumbuh menjadi kelompok komunikator profesional. Justru setiap pembangunan atau modernisasi—dalam pengertian mendasarnya—akan melahirkan kelompok komunikator profesional.¹

Tetapi, jika proporsi artikulasi politik oleh kaum politisi dan bukan politisi tergantung pada tingkat kemajuan masyarakat—makin maju makin banyak peranan non-politisi formal—maka sesuai dengan tingkat perkembangannya negara kita masih dalam tahap pertumbuhan yang meminta peranan lebih besar dari para politisi (betapapun usaha “depolitisasi” [di negara kita] pernah ada, yang antara lain memberi dasar keberadaan Golkar yang bukan “organisasi politik” melainkan “kekayaan,” berbeda dengan PDI dan PPP).

Namun, dalam kenyataannya, Golkar adalah lembaga politik yang jauh lebih berperan daripada dua lainnya, PDI dan PPP. Ini berarti bahwa Golkar memikul tanggung jawab lebih besar dari yang dipikul dua lainnya itu, dan berarti pula bahwa peningkatan mutu profesionalisme politik lebih dituntut dari Golkar daripada yang lainnya. Ini harus kita kaitkan dengan strategi besar bangsa kita untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila. Sedikit pembicaraan tentang apa itu “demokrasi” dengan menengokkan hasil penelitian Unesco pada tahun 1949 bisa cukup relevan. Hasil penelitian Unesco tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada jawaban yang menentang demokrasi. Barangkali untuk yang pertama kalinya dalam sejarah, “demokrasi” diakui sebagai gambaran ideal yang wajar tentang semua sistem organisasi sosial dan politik yang dibela oleh para pendukung yang berpengaruh.

¹ Edward Shils, “The Emergence of Professional Communicators”, dalam Lucian W. Pye, ed., *Communications and Political Development* (Princeton, New Jersey, 1972), h. 78

2. Ide tentang demokrasi dianggap sebagai kabur dan bahkan mereka yang mengira bahwa demokrasi jelas maknanya atau bisa diterangkan dengan baik ternyata harus mengakui adanya kekaburan tertentu baik di dalam pelembagaannya ataupun di dalam piranti yang digunakannya untuk mewujudkan ide itu atau di dalam ruang lingkup kultural dan historis tempat kata-kata, ide, dan praktik nyatanya dibentuk.²

Kajian-kajian tentang demokrasi juga menunjukkan bahwa pada masa-masa tertentu, khususnya sebelum PD I, kata-kata itu digunakan dalam makna yang tidak begitu positif, malah mengandung pengertian yang bersifat mengejek atau menyindir (*pejorative*). Hitler bahkan tercatat pernah berusaha menggunakan kata “demokrasi” ini dengan nada menghina. Tetapi, cukup ironis baginya bahwa perang yang diletuskannya dimenangkan oleh musuh-musuhnya justru yang mengaku sebagai pendukung “demokrasi”.

Tinjauan itu menunjukkan bahwa masalah “demokrasi”, secara konsepsional, tidaklah sederhana. Kini demokrasi secara erat dikaitkan oleh Barat. Namun, Barat sendiri menganut berbagai versi demokrasi, sesuai dengan kultur politik negara atau bangsa yang bersangkutan. Dalam sejarah Amerika Serikat, perkataan “demokrasi” pada awalnya tidaklah begitu banyak digunakan. Mereka menggunakan perkataan “republik” dengan pengertian seperti pengertian perkataan “demokrasi” sekarang ini. Bahkan Madison pun—Madison dianggap sebagai “pencipta” demokrasi perimbangan politik yang dinamakan “*Madisonian democracy*”—juga selalu menggunakan perkataan “republik” untuk menyatakan pandangan politiknya itu. Namun, cukup menarik bahwa dari lima belas negara di dunia—semuanya dari Barat—yang dianggap “mantap” demokrasinya, yaitu Inggris, Prancis, Jerman Barat,

² S. Benn dan R. Peters, *Social Principles and the Democratic State* (London, 1973), h. 332

Belanda, Belgia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, sebagian besar berbentuk kerajaan atau monarki, meskipun konstitusional.

Berdasarkan itu, maka dapat dibenarkan bahwa bangsa Indonesia berpandangan tentang adanya bentuk demokrasi tertentu yang cocok untuk Indonesia, yaitu “Demokrasi Pancasila”. Ini dapat dilihat sebagai penegasan bahwa Demokrasi Pancasila adalah pandangan politik bangsa Indonesia yang meskipun modern atau sejalan dengan perkembangan zaman namun berakar dalam “budaya politik” Indonesia. Di sini harus ada kejelasan “profesional” tentang apa itu “budaya politik” Indonesia. Dan berdasarkan kejelasan itu harus diikuti dengan kreativitas (yang dinamis) dalam menumbuhkan konsep-konsep “Demokrasi Pancasila” yang relevan dengan tahap perkembangan akhir bangsa dan negara kita.³

Maka dari itu, yang pertama-tama diperlukan dalam usaha profesionalisasi politik kita adalah pemerataan pengertian yang mendalam tentang budaya politik kita yang kompleks itu oleh para pelaku politik yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Para pelaku politik itu tidak bisa tidak harus terdiri dari orang-orang yang kepentingan politiknya tidak terbatas hanya kepada pemenuhan berbagai keinginan yang bersifat pribadi, tetapi ia sanggup melambungkan pandangan dan wawasannya dalam mengatasi hal-hal yang sifatnya sementara.⁴

³ Istilah “budaya politik” (*political culture*) mulai banyak digunakan sejak pertengahan tahun 50-an, antara lain oleh ahli ilmu politik Gabriel Almond. Sebegitu jauh, karakteristik terpenting suatu budaya politik ialah bahwa ia merupakan seperangkat orientasi kepada politik dengan pola-pola tertentu, yang di dalamnya norma-norma khusus dan nilai-nilai umum terdapat saling berkait. Sebab, budaya politik suatu bangsa terdiri dari jaringan kepercayaan empiris, lambang-lambang menyatakan diri (*expressive symbols*), dan nilai-nilai yang memberi batasan pada situasi dan tempat tindakan politik berlangsung. Lihat, Lucian W. Pye dan Sidney Verba, eds., *Political Culture and Political Development* (Princeton, New Jersey, 1972), h. 513 dan 550.

⁴ Terbayang di sini riwayat panjang pertumbuhan Partai Sosial-Demokrat Jerman (SPD). Seperti dikatakan August Bebel, SPD dimulai oleh Allgemeiner

Dulu, di negeri kita ini pernah muncul adu pendapat tentang pilihan antara partai kader dan partai massa. Herbert Feith, seorang pengamat Indonesia dari Australia, mengaitkan ide tentang partai kader dengan mereka yang berorientasi politik “*problem solving*” dan partai massa dengan mereka yang berpandangan “*solidarity making*”. Sekaligus di situ ada perbedaan peranan aktivitas intelektual dan peranan aktivitas sentimental atau emosional. Juga terdapat kesejajaran itu semua dengan peranan para demagog dan kader.⁵

Deuthcher Arbeiterverein (Serikat Buruh Seluruh Jerman) yang didirikan oleh Ferdinand Lassale pada tahun 1853. Selama hampir satu abad SPD terus-menerus memerankan sebagai partai oposisi, sampai dengan datangnya Willy Brandt, Kanselir Jerman yang menjadi seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Namun, selama memainkan peranan sebagai oposisi itu SPD tidak pernah berhenti mengembangkan wawasan mereka tentang demokrasi dan keadilan berdasarkan riset-riset tentang budaya politik Jerman khususnya dan Eropa umumnya, sejak dari tokoh-tokoh pemikir dan teoritikus mereka dari masa klasik seperti Eduard Bernstein, sampai dengan Willy Eichler di masa mutakhir yang besar sekali peranannya dalam mengantarkan Brandt ke kursi kekanseliran. Wawasan-wawasan demokrasi dan keadilan mereka itu, dengan berbagai saluran disebarkan kepada orang banyak, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, khususnya melalui Yayasan Friederich-Ebert. Adalah wawasan-wawasan demokrasi sosial itu yang menjiwai dan melatarbelakangi banyak sekali segi dalam proses pendemokrasian Eropa Barat sehingga menghasilkan keadaan seperti yang ada sekarang. Lihat, Helmut Schmidt, *Social Democratic Policy for Progress and Stability* (Bonn, 1972), h. 98-103.

⁵ Edward Shis, “Demagogues and Caders in the political Development of the New States”, dalam Pye, *Op. cit.*, h. 64:

The first condition of the establishment of a modern political order is the creation of an effective administration, stable institutions of public opinion, modern educational system, public libertis, and representative, deliberate, legislative institutions. These are the prerequisites of the growth of a polity, of an order to which the inhabitants of the sovereign territory will feel they belong and to whose authorities they will attribute legitimacy. Demagogy, or rhetorical charisma, which used to be called “rabble-rousing” and is now called “mobilization of the masses”, sometimes appears to be a short cut to this objective. But in its attempt, by flamboyant oratory and the display of radiating personality, to incorporate the mass of the population into a great national effort, it almost always arouses the more clamorous among them to demands and

Oleh karena itu, langkah pertama menuju profesionalisasi politik ialah pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggung jawab, tidak bersifat demagogi dan propaganda semata-mata. Rakyat harus dididik dan disadarkan tentang berbagai kenyataan negara, yang manis maupun yang pahit, sehingga dalam mengajukan tuntutan atau harapan mereka akan berpijak pada kenyataan-kenyataan itu. Dalam implikasinya yang lebih luas, seperti dikatakan Shils dalam awal kutipan di atas, pemantapan pendidikan politik ini berarti akan menciptakan masyarakat yang terbuka dan bebas, khususnya yang menyangkut informasi dan komunikasi. Ketertutupan di bidang informasi dan komunikasi politik akan banyak menjadi lahan subur bagi berkembangnya budaya fitnah, desas-desus dan umpat-mengumpat (sebagai bentuk komunikasi tertutup), dan itu semua pada urutannya akan menjadi lahan yang baik bagi demagogi dan agitasi politik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Justru keterbukaan itu merupakan bagian integral dari demokrasi itu sendiri, termasuk Demokrasi Pancasila. Keterbukaan itu terlebih dahulu dan terutama dituntut dari para pelaku politik sendiri. Sebab, tingkah laku mereka adalah salah satu sumber peneladanan, dan peneladanan oleh orang banyak akan tumbuh menjadi kultur politik umum. Maka, jika dikehendaki pertumbuhan demokrasi, pola-pola hubungan antar-para pelaku politik itu sendiri haruslah demokratis, yaitu dengan menghindari peragaan konflik-konflik terbuka. Sistem pergaulan demokratis sampai batas yang cukup jauh menghendaki sikap saling percaya dalam semangat persamaan, seperti kata Sidney Verba:

expectations which far exceed the possibility of fulfilment. It tends to encourage the "masses" to believe that the occasion of their persistently or momentarily felt grievances results from the deliberate action of the demagogues's opponets, thus it causes commotion; it produces changes which are only of the moment; it generates conflicts which impede growth of a progressive, modern political order. Far from being a short cut, demagogi is one of the greatest menaces to the political development of the states.

Democratic politics implies a set of relationship among political actors that is both relatively equalitarian in terms of power and relatively non-conflictual.”⁶

Yang tidak kalah penting dalam profesionalisasi politik ini adalah penyadaran umum bahwa demokrasi mengimplikasikan kebebasan, dan kebebasan itu menuntut tingkat keberanian yang lebih tinggi untuk memikul tanggung jawab pribadi. Penyadaran ini penting, begitu pula latihan pendidikan untuk memikul tanggung jawab pribadi adalah vital dalam rangka pembangunan demokrasi, sebab tidak semua orang yang meneriakkan slogan-slogan kebebasan dan tanggung jawab mengerti makna kebebasan dan implikasinya. Justru, menurut Eric Fromm, banyak orang sebenarnya takut pada kebebasan, karena takut atau tidak sanggup memikul beban tanggung jawab pribadi yang menjadi implikasinya. Ketakutan inilah yang bisa menjelma dan tumbuh menjadi psikologi massa yang menghalangi pertumbuhan demokrasi, karena keadaan itu berarti akan mempersiapkan dan mengondisikan massa untuk menjadi mangsa para demagog.⁷ Dengan segala kelemahannya, organisasi politik masih merupakan sarana yang terbaik untuk memantapkan pemerintahan nasional yang sah,⁸ maka harus digunakan bagi proses demokratisasi. [❖]

⁶ Pye & Verba, *Op. cit.*, h. 552

⁷ Benn & Peters, *Op. cit.*, h. 552

⁸ Josep LaPalombara dan Myron Weiner, eds., *Political Parties and Political Development* (Princeton, New Jersey, 1972), h. 410